



KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR
NOMOR 863/Kpts/SM.210/I.8/04/2025

TENTANG
PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DOSEN POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Dosen Polbangtan Bogor harus mendukung Visi dan capaian kinerja Institusi dalam rangka pendampingan program strategis Kementerian Pertanian;
- b. bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan harus dilaksanakan oleh dosen dengan kompetensi keilmuan yang ditekuni dan berkolaborasi dengan mahasiswa;
- c. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia I Nomor 12 Tahun 2021 , tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan elanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;



ISO 21001:2018 ISO 9001:2015 ISO 37001:2016
Cert No. SIS410323EO012 Cert No. SIS410323Q011 Cert No. SIS411022A064

10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia 292/KPTS/KP.230/M/07/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian.
13. DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor TA. 2025, Nomor : SP DIPA- 018.10.2.417402/2025 Tanggal 02 Desember 2024

Memperhatikan : 1. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
2. Rencana Induk Pengembangan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Polbangtan Bogor sebagai Acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian di Lingkup Polbangtan Bogor.
KEDUA : Dosen yang ditetapkan sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan perencanaan kegiatan pkM
2. Melaksanakan kegiatan pkM
3. Menyusun rencana tindak lanjut dan pelaporan Kegiatan
KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker Polbangtan Bogor Tahun Anggaran 2025.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 April 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR POLBANGTAN BOGOR,



YOYON HARYANTO
NIP 198411292006041001

Salinan Keputusan ini Disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
2. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Direktur Politeknik
Pembangunan Pertanian Bogor
Nomor : 863/KPTS/KPA/SM.210/I.8/04/2025
Tentang Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
Dosen Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor sebagai salah satu institusi perguruan tinggi di lingkup Kementerian Pertanian, memiliki kewajiban untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut terdiri atas darma Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Selain menjalankan ketiga Pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, Polbangtan Bogor juga berkewajiban menyukseskan dan mendukung program-program Kementerian Pertanian. Dukungan tersebut disinergikan dalam setiap dharma yang dijalankan Oleh Polbangtan Bogor. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian menegaskan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan lima Program Studi (PS) yang dimiliki, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dapat berfokus mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang produksi dan kesehatan ternak, pertanian berkelanjutan, mekanisasi pertanian, dan teknologi hortikultura. Konten teknis tersebut dikemas dalam bentuk pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kapasitas dan perilakunya.

Selain itu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus mencerminkan dukungan terhadap Program Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025 yakni: (1) peningkatan produksi padi dan jagung, (2) optimalisasi lahan, (3) peningkatan produksi susu dan daging sapi, (4) cetak sawah baru, (5) penyediaan benih unggul, (6) penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan pupuk bersubsidi, (6) pengembangan pekarangan pangan bergizi, dan (7) pengembangan pertanian modern melalui petani milenial (brigade pangan).

Panduan ini disusun untuk mengakomodir beberapa kebijakan tersebut dan mensinergikan dengan pelaksanaan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan berprinsip pada: (1) Berbasis kewilayahan, (2) Berbasis hasil Riset, (3) Berdasarkan permasalahan, kebutuhan atau tantangan di masyarakat, (4) Sinergi, multi disiplin, dan

bermitra, (5) Kegiatan terstruktur, target luaran jelas dan dapat diukur, dan (6) Berkelanjutan, tuntas, dan bermakna.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akreditasi, program pengabdian kepada masyarakat dituntut memberikan nilai maksimal dari aspek komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, jumlah dan jenis kegiatan, keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki relevansi dengan pelaksanaannya yaitu dosen dan mahasiswa. Relevansi PkM pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan PS, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi. Dosen tetap merencanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.

B. Maksud dan Tujuan

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Polbangtan Bogor agar:

1. Meningkatkan kualitas dan jenis kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui implementasi hasil penelitian, proses pembelajaran, dan pendampingan program Kementerian Pertanian;
2. Membangun kolaborasi antara perguruan tinggi, mitra swasta, dan berbagai pihak dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Menghasilkan sentra-sentra unggulan komoditas atau jasa di sektor pertanian melalui pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan berbagai pihak.
4. Meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh melalui program pendampingan petani pada kegiatan pengabdian kepada

Panduan ini bertujuan untuk memberikan tuntunan tahapan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor baik melalui dana APBN maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan atau Hibah Luar Negeri serta sumber pendanaan lainnya.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa, dan pelaku utama serta pelaku usaha di sektor pertanian.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Panduan ini meliputi:

1. Perencanaan kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan
3. Rencana tindak lanjut kegiatan
4. Pelaporan hasil kegiatan
5. Monitoring dan Evaluasi kegiatan

E. Pengertian

Dalam juknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metode ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional;
2. Brigade Pangan adalah program Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan lahan pertanian terstruktur dan modern melalui pemanfaatan alsintan yang dikelola oleh 15 orang petani milenial;
3. Pertanian Modern adalah sistem pertanian yang menggunakan teknologi dan inovasi terbaru untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan dalam proses produksi pertanian. Pertanian modern memanfaatkan berbagai teknologi canggih, metode ilmiah, dan praktik manajemen yang bertujuan untuk memaksimalkan hasil pertanian sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
4. Luas Tambah Tanam (LTT) adalah istilah dalam pertanian yang merujuk pada luas lahan yang ditanami oleh petani lebih dari satu kali dalam satu periode tertentu. LTT mencakup kegiatan penanaman ulang atau tambahan yang dilakukan setelah panen pada lahan yang sama, atau penanaman di lahan baru yang belum ditanami sebelumnya pada musim yang sama;
5. Optimalisasi Lahan adalah upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan pertanian atau non-pertanian agar memberikan hasil yang lebih produktif, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi terbaik dari lahan tersebut;
6. Desa Mandiri Pangan adalah Desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan;
7. Desa Agroeduwisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang mengombinasikan kegiatan pertanian (agro), edukasi, dan pariwisata (wisata) dalam satu konsep terpadu;
8. Desa Organik adalah desa yang masyarakatnya secara kompak melaksanakan pertanian organik berbasis tanaman dan/atau ternak;
9. Kampung Hortikultura adalah kawasan pedesaan atau area tertentu yang secara khusus difokuskan pada budidaya tanaman hortikultura, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, bunga, dan tanaman hias. Kampung ini biasanya dijadikan sebagai pusat kegiatan pertanian hortikultura yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat setempat, peningkatan ekonomi lokal, serta potensi wisata dan edukasi;
10. Desa Sapi adalah konsep kawasan pedesaan yang difokuskan pada pengembangan peternakan sapi, baik sapi perah maupun sapi potong, dengan tujuan meningkatkan produksi ternak, pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, serta mendukung ketahanan pangan, khususnya dalam penyediaan daging dan susu;
11. Desa Ramah Lingkungan adalah sebuah konsep desa yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber

- daya alam dan lingkungan sekitarnya. Desa ini mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dengan alam serta menjaga keseimbangan lingkungan;
12. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah inovasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap kelompok masyarakat membentuk kelompok dan menjalin kerjasama dengan kelompok masyarakat lain. Targetnya antara lain masyarakat yang produktif secara ekonomi, masyarakat yang belum produktif secara ekonomis tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan, dan masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi;
 13. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS) adalah inovasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pemberian stimulus pada klaster kepada dosen dengan status Kurang Memuaskan pada PkM;
 14. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan kegiatan proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik dilakukan bersama dengan kepala desa, BUMDes, koperasi, atau organisasi desa lainnya;
 15. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) adalah program dari Ristekdikti dan/ APBN Kementerian Pertanian untuk mewadahi, melatih, meningkatkan potensi dan kemampuan wirausaha mahasiswa dengan berbagai latar belakang bidang keilmuan yang bisa dijadikan lahan bisnis;
 16. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) adalah program pengabdian yang bertujuan untuk mendorong terciptanya produk unggulan daerah yang memiliki kualitas baik dan ciri khas daerah tersebut.
 17. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) adalah program pengabdian yang bertujuan memberi fasilitas pendanaan agar sebuah Perguruan Tinggi (PT) bisa melahirkan produk intelektual dan menjadi aset bagi program tersebut.
 18. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) merupakan kegiatan pengabdian yang bersifat problem solving, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (sustainable) dengan sasaran yang tidak tunggal. Program ini merupakan bentuk penerapan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen atau staf PLP.
 19. Program Kemitraan Wilayah (PKW) adalah program untuk meningkatkan kemandirian, kenyamanan kehidupan, sekaligus kesejahteraan masyarakat.
 20. Mitra adalah sasaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN

A. Jenis Kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat oleh Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dilakukan dengan mengaplikasikan konsep pemberdayaan masyarakat (*Community Based Development*) secara tematik berbasis desa dan diharapkan melibatkan pentahelir (Pemerintah, Akademisi/Praktisi, Komunitas, Pengusaha, Masyarakat, dan Media).

Jenis kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dapat berupa:

1. Kegiatan PkM mendukung program eselon I Kementerian Pertanian. Bentuk kegiatan PkM dengan pola sinergitas program eselon I Kementan dapat berupa:
 1. Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM);
 2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK);
 3. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM);
 4. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah serta;
 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT);
 6. Pendampingan program Kementerian Pertanian.Beberapa output program sinkronisasi Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap program eselon I Kementerian Pertanian yakni Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian dan eselon I lainnya yang terkait diantaranya terbentuknya:
 - a. Brigade Pangan;
 - b. Pertanian Modern;
 - c. Luas Tambah Tanam;
 - d. Optimalisasi Lahan;
 - e. Desa Mandiri Pangan;
 - f. Desa Agroeduwisata;
 - g. Desa Organik;
 - h. Kampung Hortikultura;
 - i. Desa Sapi; dan
 - j. Desa Ramah Lingkungan.
2. Kegiatan PkM pola kemitraan dengan eksternal. Pola ini dapat berupa program CSR perusahaan, kerjasama pemerintah daerah, atau bentuk lain sesuai dengan target mitra eksternal.
3. Kegiatan PkM Mandiri
Pola PkM mandiri merupakan jenis PkM yang tidak didanai oleh Polbangtan Bogor dan pihak eksternal. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan inisiatif dosen.

B. Lokasi

Lokasi pelaksanaan kegiatan PkM adalah di wilayah lingkaran kampus Polbangtan Bogor yang sudah dan akan melaksanakan MOU, serta wilayah yang menjadi Lokasi program Kementerian Pertanian. Beberapa lokasi yang menjadi fokus dan sedang berproses bekerjasama dengan Polbangtan Bogor adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
2. Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
3. Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat
4. Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

5. Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
6. Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
7. Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bentuk kerjasama dengan mitra, maka lokasi kegiatan pengabdian masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan mitra.

C. Tahapan Perencanaan

1. Sosialisasi juknis dan perencanaan anggaran. Anggaran Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dan dari mitra (eksternal);
2. Identifikasi Mitra yang akan dilibatkan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dari unsur komunitas, Lembaga Swadaya Masyarakat, pengusaha, pemerintah daerah, media, dan kelompok masyarakat;
3. *Focus Grup Discussion* (FGD) dengan mitra untuk perencanaan pelaksanaan kegiatan.

BAB III PELAKSANAAN

A. Waktu

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya dilakukan dengan penjadwalan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koodinasi dan survei lokasi												
2	Penentuan Tema/proposal PkM												
3	FGD persiapan												
4	Pelaksanaan kegiatan												
5	Monitoring kegiatan												
6	Evaluasi pelaksanaan												
7	Pelaporan kegiatan												
8	FGD Diseminasi hasil												

B. Tahapan dan Prosedur

1. Koordinasi dan Konsultasi
Dilakukan dalam rangka penetapan desa potensi sesuai jenis program tematik yang akan dilaksanakan, rekomendasi pemerintah daerah dan sinergi program Kementerian Pertanian atau lokasi pengembangan CSR Perusahaan.
2. Rencana Output Kegiatan
Menentukan target kegiatan yang diharapkan, baik output kegiatan serta output yang berdampak pada akreditasi program studi/institusi seperti publikasi ilmiah, prototipe teknologi tepat guna/teknologi tepat guna dan hak kekayaan intelektual (HKI).
3. Identifikasi Permasalahan
Melakukan analisis kesenjangan yang ada di lapangan berdasarkan target output yang telah ditetapkan untuk menetapkan solusi dan detil-detil kegiatan yang harus dilakukan.
4. Usulan Lokasi Sasaran Kegiatan
Menuangkan seluruh point 1-3 dan melaksanakan diskusi untuk menentukan Lokasi dan kelompok pada kegiatan Pengabdian kepada

Masyarakat sebanyak 5-7 orang Dosen, Calon Dosen dan Pranata Laboratorium Pertama.

5. Seleksi dan Penetapan
Penetapan Lokasi dan sasaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terpilih didasarkan pada hasil diskusi dan evaluasi pada tahun sebelumnya, serta kelengkapan dalam melaksanakan program dan ketersediaan anggaran yang ada di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor.
6. Pelaksanaan kegiatan
Kegiatan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat sesuai dengan perannya masing-masing. Pelaksanaan kegiatan dikoordinir oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM).
7. Rencana tindak lanjut
Sebagai pengakhiran kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dilakukan penyusunan rencana tindak lanjut oleh masing-masing kelompok PkM. Rencana tindak lanjut ini akan menjadi bahan diskusi dan evaluasi mengenai tindak lanjut kegiatan PkM pada sasaran tersebut.
8. Pelaporan hasil
Kegiatan pengakhiran dari pengabdian kepada Masyarakat yaitu pelaporan dan penyampaian hasil di akhir tahun. Masing-masing kelompok pengabdian menyampaikan laporan hasil kegiatan dan rencana tindak lanjut tahun selanjutnya.
9. Monitoring dan evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan evaluasi untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Kegiatan ini dikoordinir oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM).

BAB IV PEMBIAYAAN

A. Sumber Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat berasal dari:

1. Anggaran institusi (DIPA);
2. Dana hibah penelitian dan pengabdian dari Kementerian/Lembaga;
3. Kerja sama dengan pihak ketiga (pemerintah daerah, dunia usaha, NGO, atau yang lainnya);
4. Swadaya masyarakat atau kontribusi mitra.

B. Usulan Pembiayaan

Usulan pembiayaan disusun oleh tim pelaksana dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang memuat komponen-komponen biaya yang diperlukan secara rinci dan proporsional sesuai dengan rencana kegiatan. Komponen RAB dapat mencakup:

1. Bahan habis pakai kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
2. Transportasi dan uang harian kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
dan
3. Konsumsi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Penetapan dan Pencairan Dana

1. Setelah proposal/rencana kegiatan disetujui, dana akan ditetapkan sesuai hasil evaluasi dan ketersediaan anggaran;
2. Pencairan dana dilakukan secara bertahap atau sekaligus, sesuai ketentuan yang berlaku di institusi;
3. Pencairan dana dilakukan melalui rekening resmi pelaksana kegiatan atau melalui bendahara institusi, dengan dasar Surat Keputusan penugasan dan/atau Surat Perintah Membayar (SPM).

D. Penggunaan Dana

Penggunaan dana wajib mengikuti prinsip:

1. Efisien (menghindari pemborosan),
2. Efektif (mendukung pencapaian tujuan kegiatan),
3. Transparan (jelas dan terbuka),
4. Akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

Segala pengeluaran harus didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah, seperti nota, kuitansi, tiket, dan dokumen pendukung lainnya.

E. Pertanggungjawaban Keuangan

Pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan secara tertulis oleh ketua/koordinator kelompok pelaksana kegiatan paling lambat 30 hari setelah kegiatan selesai. Dokumen pertanggungjawaban meliputi:

1. Laporan penggunaan dana (format sesuai institusi),
2. Bukti-bukti pengeluaran (asli dan sesuai RAB),
3. Dokumentasi kegiatan (foto, berita acara, daftar hadir, surat penugasan),
4. Laporan kegiatan PkM.

Pertanggungjawaban disampaikan kepada unit yang berwenang (misalnya Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau keuangan), untuk diperiksa dan diarsipkan.

BAB V

PELAPORAN HASIL KEGIATAN

Laporan dibuat sesuai program dan kegiatan PkM yang telah diusulkan. Laporan dibuat tiga rangkap. Penyerahan laporan paling lambat minggu ke 2 bulan Desember setiap tahunnya. Laporan ditandatangani oleh Ketua Tim/koordinator Pelaksana, Kepala UPPM, dan Direktur sebagaimana format *terlampir*. Laporan berisikan rangkaian proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan beserta output yang telah berhasil dicapai, kendala, dan rekomendasi tindak lanjut.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Kegiatan monitoring dilakukan dalam rangka memastikan kegiatan PkM sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Monitoring dilakukan oleh unsur pimpinan dan dikoordinir oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada kegiatan yang dibiayai APBN maupun APBD dan oleh Mitra CSR untuk kegiatan yang disponsori, maupun kegiatan pengabdian oleh dana mandiri. Kegiatan monitoring dilakukan secara

berkala, minimal dua kali selama satu siklus kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

B. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan di akhir kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target-target output kegiatan yang telah direncanakan, sebagai dasar pertimbangan di tahun berikutnya. Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk FGD dari semua kelompok pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat beserta instansi/dinas terkait. FGD tersebut juga merupakan bentuk diseminasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pencapaian luaran yang dihasilkan baik kondisi sebelum dan sesudah serta output tambahan seperti publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, atau paten ditampilkan pada kegiatan ini.

Lampiran 1. Blanko Identifikasi Calon Sasaran dan Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat

A. IDENTITAS KELOMPOKTANI

- 1. Nama kelompok tani :
- 2. Tahun Berdiri :
- 3. Pengukuhan : NO SP.....
(SP dilampirkan) Pejabat
Tanggal
- 4. Jumlah Anggota :
- 5. Kelas kelompok tani :sesuai SP
No.....dengan skor .(SP dilampirkan)
- 6. Alamat Sekretariat :
- 7. Struktur organisasi :
Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :
Seksi-seksi :

B. KEGIATAN USAHATANI

1. Jenis usaha dan komoditas yang dikembangkan kelompok tani

NO	JENIS USAHA	LUAS/ SKALA	PRODUKSI	PRODUKTIVITAS
1	PERTANIAN			
	a.Padi			
	b. Jagung			
	c. Kedelai			
	d. Tebu			
2	e. Bawang merah			
	f. Aneka cabai			
	g.			
	PETERNAKAN			
	a.Sapi Potong/Kerbau			
	b.			

2. Permasalahan Usahatani

Agroinput/ Sarana-Prasarana

Agroproduksi/TeknologiBudidaya

Agroproccesing/ Pengolahan

Agromarketing/ Pemasaran

Agrosupporting service/ penunjang

3. Karakteristik Kelompok

- (1). Memiliki papan nama kelompok ☐Ya ☐Tidak
- (2). Memiliki jumlah anggota minimal 20 orang ☐Ya ☐Tidak
- (3). Melaksanakan pertemuan/rapat secara berkala ☐Ya ☐Tidak
- (4). Menyusun rencana kerja dalam bentuk RDK/RDKK ☐Ya ☐Tidak
- (5). Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama ☐Ya ☐Tidak
- (6). Memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi ☐Ya ☐Tidak
- (7). Memfasilitasi kegiatan usaha bersama ☐Ya ☐Tidak
- (8). Memfasilitasi usahatani secara komersial berorientasi pasar ☐Ya ☐Tidak
- (9). Melayani informasi dan teknologi bagi anggota ☐Ya ☐Tidak
- (10). Bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan ☐Ya ☐Tidak
- (11). Mengembangkan pemupukan modal kelompok ☐Ya ☐Tidak
- (12). Mendatangkan narasumber untuk proses belajar anggota ☐Ya ☐Tidak

4. Kesiapan menjadi sasaran program pembinaan

- (1). Memfasilitasi tempat pertemuan 6 kali (selama 4 bulan) ☐Ya ☐Tidak
- (2). Mengundang anggota bersedia hadir 20 orang ☐Ya ☐Tidak
- (3). Menyiapkan konsumsi pertemuan (difasilitasi) ☐Ya ☐Tidak

Bogor, ... 2025

Diketahui,
Petugas Identifikasi,

Penyuluh Pertanian

(.....)

(.....)

Lampiran 2. Format Laporan Kegiatan PkM

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

RINGKASAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Analisis Situasi (Paparkan kondisi riil mitra (kelompok tani/masyarakat) yang menjadi sasaran, tuliskan potensi yang dimiliki mitra, tunjukkan gap antara kondisi existing dan kondisi yang diharapkan)
- 1.2 Permasalahan Sasaran (identifikasi permasalahan yang dihadapi mitra (misal: produktivitas rendah, serangan hama, pascapanen, pemasaran, alih teknologi lambat, dll. Rumuskan permasalahan secara spesifik dan terukur berdasarkan latar belakang)
- 1.3 Tujuan Kegiatan (terdiri dari tujuan umum kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dan tujuan khusus masing – masing kelompok)
- 1.4 Manfaat Kegiatan
 - a. Bagi Mitra: Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pendapatan.
 - b. Bagi Dosen: Meningkatkan peran dan kepedulian terhadap permasalahan masyarakat sekitar kampus dan penerapan ilmu.
 - a. Bagi Perguruan Tinggi: Implementasi Tridharma, menjalin kerjasama, dan memperkuat relevansi institusi di masyarakat

BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Jelaskan Solusi permasalahan sasaran dan target luaran kegiatan pengabdian kepada Masyarakat. Berikan penjelasan pentingnya intervensi Polbangtan dalam pencapaian solusi

BAB III PELAKSANAAN

- 3.1 Lokasi Kegiatan
- 3.2 Sasaran Kegiatan
- 3.3 Tahapan Kegiatan
 - a. Persiapan kegiatan: Observasi lapangan, koordinasi dengan mitra, penyusunan materi, penyiapan alat dan bahan
 - b. Pelaksanaan kegiatan (jelaskan metode dan jadwal kegiatan pengabdian kepada Masyarakat)
 - c. Materi kegiatan

BAB IV HASIL KEGIATAN

- 4.1 Pencapaian Target
- 4.2 Kendala Pelaksanaan (Jelaskan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan (cuaca, partisipasi, teknis) dan bagaimana mengatasinya)
- 4.3 Dampak kegiatan terhadap mitra (bagaimana perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan sasaran/mitra kegiatan PkM)
- 4.4 Rekomendasi Tindak Lanjut (susun rencana tindak lanjut kegiatan yang berisi kelanjutan program termasuk pembiayaan dan pihak yang terlibat)

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

- 5.1 Simpulan
- 5.2 Saran

LAMPIRAN

Administrasi Kegiatan/daftar hadir kegiatan

Dokumentasi Kegiatan

Materi kegiatan

Lampiran 3. Format Cover Laporan

**LAPORAN KEGIATAN
JUDUL DAN LOKASI KEGIATAN**



**TIM PELAKSANA
NAMA DOSEN | NIDN
NAMA MAHASISWA | NIM**

**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR
TAHUN**

Lampiran 4 Form Rencana Tindak Lanjut dan pengajuan perjalanan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Formulir rencana tindak lanjut kegiatan pengabdian kepada masyarakat

No.	Aspek / Komponen	Uraian Rencana Tindak Lanjut	Tujuan / Hasil yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Waktu
1	Perencanaan dan Koordinasi				
2	Aspek Teknis / Materi				
3	Aspek Sosial dan Kelembagaan				
4	Aspek Ekonomi				
5	Aspek Lingkungan				
6	Aspek Monitoring dan Evaluasi				
7	Aspek Publikasi dan Dokumentasi				
8	Aspek Kemitraan dan Keberlanjutan				

Formulir Pengajuan Perjalanan Dinas Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Tim yang berangkat	Tanggal	Lokasi Tujuan	Materi